

DOKUMEN

RENCANA KERJA
(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (Performance) satuan kerja DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar mutlak diperlukan guna membangun persepsi dan komitmen di lingkungan DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021-2026.

Rencana Kerja sangat penting bagi upaya pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan karena hal yang akan diungkapkan dalam Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya adalah indikator sasaran (outcome) pada setiap kegiatan akan dapat mendukung pencapaian sasaran atau apakah outcomes sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Apabila sudah sesuai maka langkah selanjutnya adalah penetapan besarnya target sasaran dan anggaran yang diperlukan pada tahun berjalan.

Benteng, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Muhammad Arsyad, S.Km., M.Kes., M.Sc.PH.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19750101 199903 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU 2022.....	7
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN ..	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	27
BAB V PENUTUP.....	29

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. Renja Perangkat Daerah di samping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Dinas PMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD.

Renja Perangkat Daerah DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2023. Adapun berhasil dan tidaknya Renja Perangkat Daerah ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Sebagaimana Telah Diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Surat Edara Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Koordinasi

- Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedomandan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Sebagaimana Telah Diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik "SPIPISE";
27. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
29. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Selayar;
30. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor

C. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk 1 Tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA OPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di OPD.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehinggadapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/ kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

D. Sistematikan Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PERANGKAT DAERAH tahun lalu

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kinerja DPMPTSPK Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Berikut ini dapat dilihat hasil pengukuran kinerja :

A. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran/
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Bidang Penanaman Modal	Dinas PMPTSPTK		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63,03%
					83,00%
					Rp. 7.545.448.669,-
				a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
					28.585.000,-
				1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dok
					2.740.000,-
				2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok
					4.590.000,-
				3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	1 Dok
					4.000.000,-
				4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dok
					4.000.000
				5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	1 Dok
					5.255.000
				6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dok
					2.000.000
				7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok
					6.000.000
				b.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran/
1	2	3	4	5	6
					3.740.235.000,-
				1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	49 Orang
					3.724.015.000,-
				2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok
					4.220.000,-
				3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD	14 Dok
					3.000.000,-
				4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan
					9.000.000,-
				c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%
					6.679.000,-
				1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok
					2.150.000,-
				2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4Dok
					2.440.000,-
				3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Dok
					2.089.000,-
				d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
					382.327.600,-
				1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis
					28.247.600,-
				2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis
					14.400.000,-
				3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	350 SPD
					339.680.000,-
					100%

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran/
1	2	3	4	5	6
				e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.413.000,-
				1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit 43.663.000,-
				2) Pengadaan Aset tak berwujud	13.000.000,-
				3) Pengadaan mebel	25 Unit 3.750.000,-
				f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% 485.307.000,-
				1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Jenis layanan 153.031.000,-
				2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 Jenis layanan 332.276.000,-
				g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Unit 266.778.000,-
				1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1Jenis 94.198.000,-
				2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis 44.220.000,-
				3) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Jenis 128.360.000,-

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran/
1	2	3	4	5	6
				Program Promosi Penanaman Modal	20 Perusahaan
					154.662.000,-
				Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	2 kali
					154.662.000,-
				1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok
					154.662.000,-
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 52.000
					393.394.000,-
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 52.000
					393.394.000,-
				1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	182 Orang
					261.284.000,-
				2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Perusahaan
					132.110.000,-
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	40%
					40.000.000,-
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dok
					40.000.000,-
				1) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	
					40.000.000,-
				Program Pelayanan Penanaman Modal	100%

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran/
1	2	3	4	5	6
					187.678.000,-
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1200 Izin
					187.678.000,-
				1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1200 Izin
					138.468.000,-
				2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha
					14.210.000,-
				3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	
					20.000.000,-
				4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Intensif Daerah	3 Koordinasi
					15.000.000,-
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%
					21.250.000,-
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%
					21.250.000,-
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	12 Laporan
					21.250.000,-

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran/
1	2	3	4	5	6
				Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	
2	Urusan Bidang Tenaga Kerja	Dinas PMPTSPTK		Program Perencana Tenaga Kerja, dengan pagu Anggaran	50%
					Rp. 15.800.000,-
				Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	2 Dok
					15.800.000,-
				Penyusunan rencana tenaga kerja makro	1 Dok
					100%
					15.800.000,-
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0,40%
					152.756.069,-
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	10 Pelatihan
					131.526.069,-
				1) Proses pelaksanaan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	30 Orang
					38.056.069,-
				2) Koordinasi Lintas lembaga dan Kerja sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	93.470.000,-
				Kegiatan Konsultasi pada Perusahaan Kecil	5 Perusahaan
					21.230.000,-
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	5 perusahaan
					21.230.000,-
				Program Penempatan Tenaga Kerja,	19,84%

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran/
1	2	3	4	5	6
					587.944.000,-
				Kegiatan Pelayanan Antarakerja di Daerah Kabupaten/Kota	60 orang
					587.944.000,-
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar kerja	2 layanan
					25.834.000,-
				Pelayanan antar kerja	50 Orang
					12.110.000,-
				Perluasan Kesempatan kerja	100 Orang
					550.000.000,-
				Program Hubungan Industrial	0,60%
					1.037.440.000,-
				Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang memepunyai wilayahbkerja lebih dari 1(satu) Kab/Kota	10 Perusahaan
					2.320.000,-
				1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10 Perusahaan
					2.320.000,-
				Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Kali
					1.035.120.000,-
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2 Program
					1.035.120.000,-

B. Realisasi Anggaran DPMPTSPK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Urusan Bidang Penanaman Modal	Dinas PMPTSPTK		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63,03%		
					83,00%	97,90%	
					Rp. 7.545.448.869,-	Rp. 7.386.972.856,-	
					a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99,63%
						28.585.000,-	28.477.960,-
					1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dok	99,98%
						2.740.000,-	2.739.400,-
					2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok	97,69%
						4.590.000,-	4.483.900,-
					3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	1 Dok	100%
						4.000.000,-	4.000.000,-
					4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dok	100%
						4.000.000	4.000.000,-
					5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	1 Dok	100%
						5.255.000	5.255.000-
					6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dok	100%
						2.000.000	2.000.000,-
					7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	99,99%
						6.000.000	5.999.660,-
					b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		98,19%
						3.740.235.000,-	3.672.678.850,-
					1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	49 Orang	98,19%

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
					3.724.015.000,-	3.656.458.850,-
				2) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	100%
					4.220.000,-	4.220.000,-
				3) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	14 Dok	14 Dok
					3.000.000,-	3.000.000,-
				4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan	100%
					9.000.000,-	9.000.000,-
				c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%
					6.679.000,-	6.679.000,-
				1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dok	100%
					2.150.000,-	2.150.000,-
				2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Dok	100%
					2.440.000,-	2.440.000,-
				3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Dok	100%
					2.089.000,-	2.089.000,-
				d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99,96%
					328.327.600,-	382.178.000,-
				1) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	99,82%
					28.247.600,-	28.197.500,-
				2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis	100%
					14.400.000,-	14.400.000,-
				3) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	350 SPD	99,97%
					339.680.000,-	339.580.500,-
				e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	98,00%
					60.413.000,-	59.205.000,-
				1) Pengadaan Aset tak Berwujud		100%
					13.000.000,-	13.000.000,-
				2) Pengadaan mebel	25 Unit	93,33%
					3.750.000,-	3.500.000,-
					4 Unit	97,81%

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
				3) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	43.663.000,-	42.705.000,-
				f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,02%
					485.307.000,-	480.569.031,-
				1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Jenis layanan	99,67%
					153.031.000,-	152.522.431,-
				2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 Jenis layanan	98,73%
					332.276.000,-	328.046.600,-
				g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Unit	98,73%
					266.778.000,-	263.393.000,-
				4) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	96,69%
					94.198.000,-	91.083.000,-
				5) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	100%
					44.220.000,-	44.220.000,-
				6) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Jenis	99,79%
					128.360.000,-	128.090.000,-
				Program Promosi Penanaman Modal	20 Perusahaan	96,18%
					154.662.000,-	148.752.366,-
				Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	2 kali	96,18%
					154.662.000,-	148.752.366,-
				1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	96,18%
					154.662.000,-	148.752.366,-
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	52.000	81,26%
					393.394.000,-	319.688.000,-
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	52.000	81,26%
					393.394.000,-	319.688.000,-
					182 Orang	81,63%

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
				1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	261.284.000,-	213.278.000,-
				2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Perusahaan	80,55%
					132.110.000,-	106.410.000,-
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	40%	97,54%
					40.000.000,-	39.014.000,-
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	97,54%
					40.000.000,-	39.014.000,-
				1) Penyedia Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		97,54%
					40.000.000,-	39.014.000,-
				Program Pelayanan Penanaman Modal	100%	99,99%,-
					187.678.000,-	187.651.400,-
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1200 Izin	99,99%,-
					187.678.000,-	187.651.400,-
				1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1200 Izin	99,98%
					138.468.000,-	138.441.400,-
				2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	100%
					14.210.000,-	14.210.000,-
				3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	0 Orang	100%
					20.000.000,-	20.000.000,-
				4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah	3 Koordinasi	100%
					15.000.000,-	15.000.000,-
					100%	99,69%

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	21.250.000,-	21.184.000,-
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,69%
					21.250.000,-	21.184.000,-
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegarsi secara Elektronik	12 Laporan	99,69%
					21.250.000,-	21.184.000,-
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0,40%	99,91%
					152.756.069,-	152.612.069,-
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	10 Pelatihan	99,89%
					131.526.069,-	131.382.069,-
				1) Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	30 Orang	99,63%
					38.056.069,-	37.916.069,-
				2) Koordinasi Lintas lembaga dan Kerja sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Lembaga	100%
					93.470.000,-	93.466.000,-
				Kegiatan produktivitas pada Perusahaan Kecil	5 Perusahaan	100%
					21.230.000,-	21.230.000,-
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	5 perusahaan	100%
					21.230.000,-	21.230.000,-
				Program Penempatan Tenaga Kerja,	19,84%	99,98%
					587.944.000,-	587.825.180,-
				Kegiatan Pelayanan Antarakerja di Daerah Kabupaten/Kota	60 orang	99,98%
					587.944.000,-	587.825.180,-
					2 layanan	99,62%

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	25.834.000,-	25.735.180,-
				Pelayanan Antar Kerja	50 Orang	99,83%
					12.110.000,-	12.090.000,-
				Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	100%
					550.000.000,-	550.000.000,-
				Program Hubungan Industrial	0,60%	99,96%
					1.037.440.000,-	1.037.065.000,-
				Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kab/Kota	10 Perusahaan	100%
					2.320.000,-	2.320.000,-
				1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10 Perusahaan	100%
					2.320.000,-	2.320.000,-
				Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Kali	99,96%
					1.035.120.000,-	1.034.745.000,-
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial dan Peluang Usaha Kabuapten/Kota	2 Program	99,96%
					1.035.120.000,-	1.034.745.000,-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023

A. Tujuan

Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dari segi kelembagaan, sumber daya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima.

B. Sasaran

Optimalnya fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Pelayanan Perizinan, Penanaman Modal dan Ketenaga Kerjaan.

C. Program, Kegiatan, dan SubKegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perangkat Daerah
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan Perangkat Daerah
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perangkat Daerah
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan Perangkat Daerah
 - 6) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah
 - 7) Evaluasi Kinerja perangkat daerah
 - 8) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 3) Pengelolaan dan bahan tanggapan pemeriksaan
 - 4) penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran
 - 5) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggran
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 3) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
 - 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah
 - 7) Penatausahaan Arsip dinamis pada Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 2) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 3) Pengadaan Mebeleur
 - 4) Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya
 - 5) Pengadaan Aset tetap lainnya
 - 6) Pengadaan aset tak berwujud
 - 7) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- e. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 3) Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
 - 4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebeleur
 - 4) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 5) Pemeliharaan Aset tetap lainnya
 - 6) Pemeliharaan aset tak berwujud
 - 7) Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Promosi Penanaman Modal

- a. Penyelenggraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
 - 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Penanaman Modal
 - 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
 - 1) Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis terintegrasi secara elektronik
6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 7. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
 - 2) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
- 8. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi
 - 1) Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
 - 2) koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja
 - b. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil
 - 1) Pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil
- 9. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Pelayanan antarkerja di daerah Kab/Kota
 - 1) Penyediaan sumberdaya pelayanan antar kerja
 - 2) Pelayanan antar Kerja
 - 3) Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
 - 4) penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan

- 5) Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam
 - 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - 1) Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi
 - 2) Pengawasan dan pengendalian LPTKS
 - c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 1) pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online
 - 2) pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online
 - 3) Job Fair/ bursa kerja
 - d. Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota
 - 1) Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI) / pekerja migran indonesia (PMI)
 - 2) Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran
 - 3) Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan
 - e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - 1) Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu daerah kabupaten/kota
10. Program Hubungan Industrial
- a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang memepunyai wilayahbkerja lebih dari 1(satu) Kab/Kota
 - 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - 2) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi
- 1) Pencegahan dan penyelesaian industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - 2) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten / kota;
 - 3) Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi;
 - 4) Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kabupaten/kota;
 - 5) Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. Rencana Kerja

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023. Rencana kerja di susun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja (RKA-Perangkat Daerah) pada tahun berkenaan.

Rencana kerja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Adapun Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Berikut :

1. Rencana Program Prioritas Utama
 - a. Program Promosi Penanaman Modal
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Rencana Program Reguler (urusan dasar)
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota
 - b. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

B. PENDANAAN

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra OPD berdasarkan pagu indikatif, adapun dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan disajikan pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENJA PERANGKAT DAERAH DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar di atas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Ternpadu Satu Pintu



Muhammad Arsyad, S.Km., M.Kes., M.Sc.PH.

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19750101 199903 1 010

LAMPIRAN

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kode Rekening					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	RENCANA KEBUTUHAN/PAGU INDIKATIF				Ket.
								2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	
1						3	4	5	6	7	8	9
X					Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			-	5.466.536.022	-	7.208.668.654	
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Persentase Capaian Kinerja (%)		70,28%	4.527.036.022	-	6.501.083.720	
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)		85%				
			2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	25.000.000		44.000.000	
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	2 dok	3.000.000	2 dok	5.000.000	
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DAU	1 dok	5.000.000	1 dok	6.000.000	
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DAU	1 dok	5.000.000	1 dok	6.000.000	
				04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DAU	1 dok	3.000.000	1 dok	6.000.000	
				05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DAU	1 dok	3.000.000	1 dok	6.000.000	
				06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	4 dok	2.000.000	1 dok	7.000.000	
				07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	4 dok	4.000.000	4 dok	8.000.000	
			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel		100%	3.805.752.022	1 tahun	4.667.083.720	
				01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	49 orang	3.792.752.022	49 Orang	4.651.083.720	
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DAU	dok	-	Dokumen		
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DAU	Bulan	-	12 Bulan		
				04	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DAU	dok	-	Dokumen		
				05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	DAU	dok	4.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
				06	Pengelolaan dan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	DAU	kali/ tahun		1 Dokumen		
				07	penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	DAU	2 Dokumen	4.000.000	14 Dokumen	5.000.000	
				08	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DAU	12 Dokumen	5.000.000	12 laporan	6.000.000	

Kode Rekening					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	RENCANA KEBUTUHAN/PAGU INDIKATIF				Ket.
								2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	
1					3	4	5	6	7	8	9	
			2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi perangkat daerah yang terkelola dengan baik dan sistematis		100%	131.666.400	100%	450.000.000	
				01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DAU	Jenis	-	3 Jenis	-	
				02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DAU	Jenis	-	8 Jenis	-	
				03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DAU	Jenis	-	Jenis	-	
				04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DAU	Jenis	-	2 Jenis		
				05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DAU	2 Jenis	10.002.400	2 Jenis	50.000.000	
				06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	DAU	3 Jenis	5.070.000	3 jenis	25.000.000	
				07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	DAU	-	-			
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	DAU		-			
				09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	30 Kali	116.594.000	350 SPD	375.000.000	
				10	Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DAU	dok	-	1 Dokumen	-	
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	DAU	aplikasi	-	1 Aplikasi		
			2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah yang efisien, efektif, transparan dan terbuka serta akuntabel.		100%	-	100%	200.000.000	
				01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DAU	Unit	-	unit	-	
				02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DAU	Unit	-	2 unit	50.000.000	
				03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	DAU	Unit	-	Unit		
				04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	DAU	Unit	-	Unit		
				05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DAU	Unit	-	27 unit	50.000.000	
				06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DAU	Unit	-	4 unit	50.000.000	
				07	Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	DAU	5 Unit	-	unit	-	
				08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah Unit Gedung Kantor atau	DAU	Unit	-	unit	-	
				09	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	DAU	Unit		Unit		
				10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	DAU	Unit	-	1 unit	50.000.000	

Kode Rekening					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	RENCANA KEBUTUHAN/PAGU INDIKATIF				Ket.
								2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	
1						3	4	5	6	7	8	9
				11	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	DAU	Unit	-	Unit		
			2.08		Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran		100%	477.497.600	100%	820.000.000	
				01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	Jenis	-	Jenis	-	
				02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	3 Jenis layanan	196.990.000	3 Jenis layanan	160.000.000	
				03	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DAU	Jenis	-	2 Jenis	-	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan umum Kantor yang tersedia	DAU	3 Jenis layanan	280.507.600	3 Jenis layanan	660.000.000	
			2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah		100%	12.000.000	100%	20.000.000	
				01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DAU	2 dok	4.000.000	2 Dokumen	5.000.000	
				02	Pengadaan Barang Milik SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DAU	dok	-	Dokumen		
				03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DAU	dok	-	Dokumen		
				04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DAU	dok	-	Dokumen		
				05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DAU	2 kali	4.000.000	2 kali	10.000.000	
				06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DAU	2 dok	4.000.000	2 Dokumen	5.000.000	
				07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	DAU	dok	-	Dokumen		
			2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Meningkatnya Tata Kelola administrasi dan Kualitas Aparatur		100%	-	100%	50.000.000	
				01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DAU	ASN	-	ASN	-	
				02	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DAU	ASN	-	ASN	-	
				03	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DAU	dok	-	Dokumen	-	
				05	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DAU	kali	-	kali		
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	DAU	orang	-	5 orang	50.000.000	
				10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	DAU	kali	-	kali	-	
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	DAU	Pegawai	-	pegawai	-	

Kode Rekening					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	RENCANA KEBUTUHAN/PAGU INDIKATIF				Ket.
								2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	
1					3		4	5	6	7	8	9
			2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		32 Unit	75.120.000		250.000.000	
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DAU	2 Unit	30.000.000	1 unit	50.000.000	
				02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DAU	20 unit	9.880.000	20 unit	50.000.000	
				05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	DAU	3 jenis	-	3 Jenis	-	
				06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DAU	5 jenis	35.240.000	5 jenis	50.000.000	
				07	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	DAU	Unit	-	unit	-	
				08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	DAU	Unit	-	unit	-	
				10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DAU	Unit	-	3 unit	100.000.000	
				11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DAU	unit	-	Jenis	-	
2	18				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				939.500.000		707.584.934	
		03			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	16 perusahaan	1 Kali	340.000.000	28 Perusahaan	261.688.857	
			2.01		Penyelenggara promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Penerimaan Misi Penanaman Modal	DAU	1 kali	340.000.000	2 Kali	261.688.857	
				01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan	DAU	10 Kali	-	Dokumen	-	
				02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DAU	1 Kali	340.000.000	1 kali	261.688.857	
					Kegiatan pameran penanaman modal		DAU	N/A		1 kali		
		02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase potensi untuk peluang Investasi Daerah (%)	DAU	50%	50.000.000	60%	51.953.133	
			2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/ kota	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	DAU	5 Perusahaan	50.000.000	15 Perusahaan	51.953.133	
				01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DAU	1 dok	50.000.000	dok	51.953.133	

Kode Rekening					Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	RENCANA KEBUTUHAN/PAGU INDIKATIF				Ket.
								2023		2024		
								Target	Rp	Target	Rp	
1						3	4	5	6	7	8	9
				02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	DAU	1 dok	-	1 Dokumen	-	
			2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 dokumen	-	
				01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen RUPM Kabupaten	DAU	dok	-	Dokumen	-	
						Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	DAU	dok	-	Dokumen		
				02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DAU	dok	-	Dokumen	-	
						Jumlah Dokumen Kerjasama antara instansi pemerintah dan dunia usaha yang tersedia	DAU	dok	-	Dokumen		
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang di terbitkan (%)	DAU	100%	72.000.000	100%	39.068.756	
			2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Perizinan dan Non Perizinan	DAU	1300 izin	72.000.000	1400 izin	39.068.756	
				01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DAU	1300 izin	32.000.000	1400 izin	39.068.756	
				02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	DAU	12 dok	13.530.000	1 Dokumen	-	
				03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DAU	12 dok	13.500.000	1 Dokumen	-	
				04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DAU	3 kali	12.970.000	kali	-	
2	8	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi (%)	DAU	100%	8.000.000	100%	19.700.628	
			2,01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi yang diterima	DAU	100%	8.000.000	100%	19.700.628	

